

**KAJIAN EKONOMI SUBSEKTOR PETERNAKAN DI KAWASAN SULAMPUA
(DATA 2014-2019)**

***ECONOMIC STUDY OF ANIMAL HUSBANDRY SECTOR IN SULAMPUA REGION
(2014-2019)***

Elfryanty Novita^{1*}

^{1*} Badan Pusat Statistik Kota Sorong
(Email: elfryantymonash85@gmail.com)

*Penulis korespondensi: elfryantymonash85@gmail.com

ABSTRACT

Animal Husbandry has an important role in accelerating the growth of agriculture sector as a part of food security. However, this subsector is considered gaining not much priority as other subsectors in agriculture sector, particularly in ten provinces in Sulampua (Sulawesi, Maluku and Papua) region. Generally, the economic growth of this subsector in those provinces have fluctuated from 2014 to 2019 and its contributions to Gross Regional Domestic Product (GRDP) for both farming sector and the total GRDP by province are significantly small. Two purposes of this study are to describe the challenges of animal husbandry in Sulampua (the population of livestock, the economy's growth of animal husbandry and based-area groups) and to gain analysis as early information for comparative advantages and the prospect of livestock market for subsector. Data used in this study is from BPS-Statistic Indonesia consisting of GRDP by province, the farms' farmer trade, and the total population of livestock. This study uses descriptive analysis namely Klassen Typology, Location Quotient (LQ) and Shift Share Analysis (SSA). According to Klassen Typology, the animal husbandry in Maluku Utara, Papua and Papua Barat have been relatively less developed. The result of LQ is livestock in five provinces excluding South Sulawesi is a leading sector while the result of SSA reveals that the animal husbandry in three provinces (Sulawesi Tenggara, Maluku and Papua Barat) have been relatively no comparative advantages in national level. In conclusion, the animal husbandry in provinces in Maluku and Papua have been growing slower than in Sulawesi.

Keywords: *Animal Husbandry, LQ, Shift Share, Klassen Typology, Regional (Sulawesi, Maluku, Papua)*

ABSTRAK

Subsektor peternakan memegang peranan penting dalam mendorong sektor pertanian karena merupakan bagian dari ketahanan pangan nasional, namun dalam perkembangannya subsektor ini belum mendapatkan prioritas setara dengan subsektor lainnya terutama di 10 provinsi di kawasan Sulampua. Secara umum, pertumbuhan ekonomi subsektor ini di provinsi-provinsi di kawasan tersebut masih berfluktuasi selama 2014-2019 dengan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB baik PDRB sektor pertanian (rata-rata provinsi 8,80%) maupun PDRB total (rata-rata wilayah 1,57%) tergolong masih sangat rendah. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi subsektor peternakan di 10 provinsi di

regional provinsi (populasi ternak dan unggas, laju pertumbuhan ekonomi, dan pengelompokan wilayah) dan memperoleh kajian awal mengenai keunggulan komparatif serta potensi pangsa pasar untuk subsektor tersebut. Kajian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di 10 provinsi di kawasan Sulampua yang mencakup data PDRB tahun 2014-2019, data NTP tahun 2019, serta data populasi ternak dan unggas tahun 2019. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang terdiri dari Tipologi Klassen, *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Shift Share*. Berdasarkan Tipologi Klassen, peternakan di Maluku Utara, Papua dan Papua Barat termasuk relatif tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Sulampua. Dari hasil penghitungan LQ diperoleh bahwa subsektor peternakan di lima provinsi di Pulau Sulawesi, kecuali Sulawesi Selatan adalah subsektor basis, sedangkan hasil analisis *Shift Share* menunjukkan subsektor peternakan di tiga provinsi (Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua Barat) relatif tidak memiliki daya saing secara nasional. Secara umum, subsektor peternakan di Pulau Maluku dan Papua kurang berkembang dibandingkan wilayah-wilayah di Pulau Sulawesi.

Kata Kunci: Peternakan, LQ, *Shift Share*, Tipologi Klassen, Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua)

PENDAHULUAN

Subsektor peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian yang memegang peranan penting dalam penyediaan sumber pangan khususnya kebutuhan daging bagi masyarakat. Mulyono (2007) mengemukakan bahwa sektor ini juga menjadi bahan mentah bagi sektor industri dan dapat menyerap tenaga kerja sebagian besar penduduk Indonesia karena memiliki potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Akan tetapi, pembangunan maupun kebijakan pada sektor pertanian masih berfokus pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura, serta subsektor perikanan sehingga sektor peternakan belum optimal mendapatkan perhatian dari pemerintah. Investasi dalam sektor ini di Indonesia masih sangat minim seperti dilansir oleh BKPM pada tahun 2017 hanya sekitar 0,32% dari total PMDM (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan 0,48% dari seluruh nilai PMA (Penanaman Modal Asing). Meskipun demikian, sektor ini berpotensi untuk menarik minat investor karena kebutuhan pangan berbasis protein hewani berupa daging, susu dan telur diproyeksikan makin meningkat seiring permintaan pasar.

Ismail (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa subsektor peternakan yang terdiri dari ternak potong, ternak perah, ternak lainnya, pemotongan hewan dan ternak unggas memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap perekonomian Indonesia. Sedangkan peranan subsektor ini yang terbesar adalah dalam konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 3,42% berdasarkan hasil analisis Tabel Input Output Indonesia tahun 2005. Yulia, Baga dan Tinaprilla (2015) mengungkapkan bahwa subsektor peternakan masih bersifat usaha sampingan dan menggunakan sistem tradisional yang bersifat subsisten sehingga pendapatan dari usaha ini tergolong kecil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar pangsa pasar untuk subsektor peternakan masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan secara kuantitas nilainya bersifat fluktuatif mengikuti tingkat konsumsi rumah tangga.

Kawasan Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) adalah keseluruhan wilayah yang terletak di timur Indonesia mencakup 10 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dibandingkan kawasan barat dan tengah, subsektor peternakan di kawasan ini belum semaju kedua kawasan tersebut. Selain itu, pengembangan subsektor ini untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani pada masyarakat Kawasan Sulampua tergolong belum seoptimal

kawasan lain. Masing-masing daerah memiliki komoditas ternak unggulan sehingga diharapkan selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah tersebut, juga dapat menyuplai kebutuhan penduduk di daerah lain yang berada dalam kawasan tersebut untuk menekan biaya transportasi dan pergudangan dalam pengiriman komoditas.

Paper ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum kondisi subsektor peternakan di Kawasan Sulampua dan mengkaji potensi dan perkembangannya sebagai studi awal untuk memberikan informasi mengenai kontribusi subsektor peternakan terhadap perekonomian masing-masing daerah di kawasan tersebut. Kajian ekonomi yang dimaksud adalah melalui pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan output turunannya salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi dan kontribusi subsektor peternakan. Adapun yang menjadi objek pembahasan adalah subsektor peternakan yang terdiri dari ternak yang dominan meliputi komoditas ternak sapi potong, babi dan kambing, ternak unggas beserta turunannya, yaitu daging dan telur di kawasan 10 provinsi tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang mencakup data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) subsektor peternakan, PDRB sektor pertanian serta PDRB total, data NTPT (Nilai Tukar Petani) subsektor peternakan, data populasi ternak dan unggas pada tahun 2019 dari 10 provinsi di Kawasan Sulampua yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) bekerjasama dengan Kementan RI (Kementerian Pertanian). Kurun waktu data yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan 10 provinsi di regional Sulampua tahun 2014-2019.

Definisi Operasional Variabel

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) (www.bps.go.id). PDRB diukur menurut harga berlaku dan harga konstan tahun 2010=100.
2. PDRB sektor pertanian adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi dari sektor pertanian di suatu wilayah dalam waktu tertentu, biasanya setahun. Dalam estimasi PDRB sektor pertanian mencakup subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu dan perikanan.
3. PDRB subsektor peternakan adalah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh aktivitas ekonomi dari subsektor peternakan di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (satu tahun).
4. Pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan adalah pertumbuhan pendapatan yang dihasilkan dari penciptaan PDRB subsektor peternakan.
5. Kontribusi subsektor peternakan adalah peranan dari penciptaan nilai tambah yang dihasilkan dari subsektor peternakan dalam perekonomian wilayah.
6. NTPT (Nilai Tukar Petani subsektor peternakan) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani di subsektor peternakan dengan indeks harga yang dibayar oleh petani subsektor tersebut dan dinyatakan dalam persentase.

7. Populasi ternak dan unggas adalah jumlah hewan ternak dan unggas yang diusahakan/diproduksi oleh petani/peternak untuk tujuan komersil.

B. Metode analisis

Adapun metode analisis yang diimplementasikan adalah analisis deskriptif kuantitatif yang terdiri dari analisis sederhana menggunakan tabel dan grafik untuk mengetahui perkembangan dan perbandingan subsektor peternakan dari kesepuluh provinsi di kawasan Sulampua. Analisis lainnya adalah analisis Tipologi Klassen, analisis LQ (*Location Quotient*) dan analisis Shift Share.

Analisis Deskriptif

Jenis analisis ini bersifat sederhana dan hanya bersifat sebagai informasi awal mengenai subsektor peternakan melalui penggunaan tabel dan grafik. Tabel digunakan untuk menunjukkan jumlah populasi ternak selama tahun 2019 serta kontribusi subsektor peternakan terhadap penciptaan nilai tambah atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor pertanian dan total PDRB untuk masing-masing provinsi pada tahun 2019 di Kawasan Sulampua. Sedangkan grafik garis digunakan untuk menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan per provinsi dibandingkan dengan nasional selama tahun 2014-2019.

Tipologi Klassen

Analisis ini digunakan dengan mengelompokkan 10 provinsi di Kawasan Sulampua ke dalam 4 kuadran berdasarkan pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan yang diperoleh dari PDRB atas dasar harga konstan dan nilai NTP (Nilai Tukar Petani) subsektor peternakan yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan peternak. Batas yang digunakan adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi dan nilai NTP untuk regional Sulampua. Hal ini dilakukan untuk membandingkan pencapaian wilayah dalam pengembangan subsektor peternakan antar provinsi dilihat dari tingkat pendapatan wilayah menurut nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan peternak yang mengusahakan subsektor ini melalui pendekatan NTP. Kurun waktu untuk data yang dianalisis adalah data tahun 2019.

Metode analisis ini juga digunakan dalam membandingkan laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB subsektor peternakan di wilayah analisis (10 provinsi) dengan wilayah referensi (rata-rata regional). Adapun hasil dari analisis Tipologi Klassen dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Subsektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran/KW I)
Kuadran ini menunjukkan subsektor peternakan pada provinsi yang memiliki laju pertumbuhan dan nilai kontribusinya yang lebih besar dibandingkan rata-rata regional Sulampua.
- 2) Subsektor maju tapi pertumbuhan tertekan (Kuadran/KW II)
Kuadran ini menunjukkan subsektor peternakan pada provinsi memiliki laju pertumbuhan yang lebih kecil, namun nilai kontribusinya lebih besar dibandingkan rata-rata regional Sulampua.
- 3) Subsektor potensial dan masih dapat berkembang (Kuadran/KW III)
Kuadran ini menunjukkan subsektor peternakan pada provinsi memiliki laju pertumbuhan laju pertumbuhan yang lebih besar namun nilai kontribusi subsektor ini lebih kecil dibandingkan rata-rata regional.
- 4) Bukan subsektor potensial dan tertinggal (Kuadran/KW IV)

Kuadran ini menunjukkan subsektor peternakan pada provinsi yang memiliki laju pertumbuhan dan nilai kontribusi lebih kecil dibandingkan rata-rata regional.

Data yang digunakan dalam analisis Tipologi Klassen adalah data PDRB subsektor peternakan atas dasar harga berlaku tahun 2019 yang salah satu analisis turunannya adalah kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB total provinsi dan PDRB subsektor peternakan atas dasar harga konstan (2010=100) untuk tahun 2019 dengan analisis turunannya adalah pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan.

Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis LQ bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas sektor/subsektor unggulan di suatu wilayah dibandingkan wilayah lain yang lebih luas pada suatu waktu tertentu (Hudang, 2016). Analisis ini digunakan dengan asumsi yang harus terpenuhi, yaitu kondisi geografis relatif seragam, pola aktivitas yang relatif homogen dan aktivitas ekonomi menghasilkan produk yang sama. Dalam kajian ini, kalkulasi LQ akan menentukan subsektor peternakan di kawasan Sulampua memiliki keunggulan komparatif atau tidak memiliki keunggulan komparatif.

Adapun variabel pada analisis ini adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan (2010=100) dari sepuluh provinsi di kawasan Sulampua dan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia atas dasar harga konstan sebagai referensi. Kurun waktu data yang digunakan adalah tahun 2014 hingga tahun 2019.

Adapun LQ dihitung dalam kajian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{x_j/y_j}{X/Y} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

LQ : Nilai *Location Quotient* subsektor peternakan provinsi ke-j di kawasan Sulampua

x_j : Nilai PDRB subsektor peternakan pada provinsi ke-j di kawasan Sulampua

y_j : Nilai PDRB total provinsi ke-j di kawasan Sulampua

X : Nilai PDB subsektor peternakan di tingkat nasional (Indonesia)

Y : Nilai PDB total di tingkat nasional (Indonesia)

Hasil penghitungan LQ akan menghasilkan tiga nilai yang mungkin diperoleh, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika nilai LQ sama dengan 1 mempunyai arti bahwa peranan subsektor peternakan di provinsi dalam kawasan Sulampua tersebut sama dengan subsektor peternakan di tingkat nasional. Dengan kata lain, subsektor ini di daerah tersebut dapat dikatakan subsektor basis yang masih mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.
- 2) Jika nilai LQ > 1 berarti bahwa subsektor peternakan di provinsi dalam kawasan Sulampua merupakan sektor basis/komoditas unggulan sehingga memiliki prospek menguntungkan untuk dikembangkan karena produksi subsektor ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, namun juga berpotensi untuk diekspor ke daerah lain.
- 3) Jika nilai LQ < 1 menunjukkan bahwa subsektor peternakan di provinsi dalam kawasan Sulampua termasuk dalam sektor non-basis. Hal ini berarti bahwa produksi komoditas subsektor peternakan belum dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri sehingga memerlukan komoditas subsektor peternakan dari daerah lain.

Analisis *Shift Share* (SSA-*Shift Share Analysis*)

Shift Share merupakan salah satu analisis sederhana untuk mengevaluasi performa perekonomian daerah sehingga dapat diketahui adanya pergeseran pangsa sektor-sektor ekonomi dalam wilayah (Kesuma dan Utama, 2015). Melalui analisis ini juga dapat memberi gambaran mengenai perkembangan subsektor peternakan di kawasan Sulampua terhadap perkembangan subsektor peternakan secara nasional dan perbandingan perkembangan subsektor peternakan secara relatif dengan subsektor peternakan secara nasional dalam hal daya saing.

Variabel dalam analisis ini adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan dari sepuluh provinsi di kawasan Sulampua dan nilai PDB Indonesia pada tahun 2014 dan tahun 2019.

Adapun rumus untuk penghitungan analisis *Shift Share* dapat dijabarkan sebagai berikut.

$$PN_j = (Ra)Y_j \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$PP_j = (Ri - Ra)Y_j \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$PPW_j = (rj - Ri)Y_j \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$\Delta Y_j = PN_j + PP_j + PPW_j \quad \dots\dots\dots (5)$$

Sedangkan penghitungan untuk rasio (Ri, Ra, rj) dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Ra = \frac{Y_{..} - Y'_{..}}{Y_{..}}, Ri = \frac{Y'_{.j} - Y_j}{Y_{.j}}, rj = \frac{Y'_{.j} - Y_j}{Y_j} \quad \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan:

PN_j : Komponen *National Share*/Nilai pertumbuhan PDRB subsektor peternakan di provinsi ke-j

Ra : Rasio rata-rata laju pertumbuhan PDB nasional di daerah

Y_j : Nilai PDRB subsektor peternakan pada provinsi ke-j pada tahun 2014

PP_j : Komponen pertumbuhan proporsional subsektor peternakan pada provinsi ke-j

Ri : Rasio rata-rata laju pertumbuhan PDB subsektor peternakan secara nasional

PPW_j : Pergeseran diferensial/pertumbuhan pangsa wilayah subsektor peternakan pada provinsi ke-j

rj : Rasio rata-rata laju pertumbuhan PDRB subsektor peternakan pada provinsi ke-j

ΔY_j : Pertumbuhan PDRB total subsektor peternakan pada provinsi ke-j

$Y'_{..}$: Nilai PDB Indonesia pada tahun 2019

$Y_{..}$: Nilai PDB Indonesia pada tahun 2014

$Y'_{.j}$: Nilai PDB Indonesia pada subsektor peternakan tahun 2019

$Y_{.j}$: Nilai PDB Indonesia pada subsektor peternakan tahun 2014

$Y'_{.j}$: Nilai PDRB subsektor peternakan pada provinsi ke-j tahun 2019

Dalam analisis *Shift-Share* ini diperoleh tiga informasi dasar (Kesuma dan Utama, 2015), yaitu sebagai berikut.

- 1) Komponen *National Share* (PN_j) yang menjelaskan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari subsektor peternakan masing-masing provinsi di kawasan Sulampua dengan pertumbuhan ekonomi dari subsektor sama untuk wilayah yang dijadikan referensi (Indonesia/nasional).
- 2) Komponen pertumbuhan proporsional (PP_j) yang menunjukkan perubahan kinerja subsektor peternakan dari masing-masing provinsi di kawasan Sulampua terhadap sektor yang sama di daerah yang dijadikan sebagai referensi (Indonesia/nasional).

Komponen pergeseran diferensial/pertumbuhan pangsa wilayah (PPW_j) yang menentukan seberapa jauh kemampuan daya saing dari subsektor peternakan di masing-masing provinsi di kawasan Sulampua dengan daya saing secara nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, subsektor peternakan di Kawasan Sulampua tergolong cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Subsektor ini mencakup ternak dan unggas termasuk produk turunannya, yaitu daging dan telur. Ternak yang dominan diusahakan di 10 provinsi di kawasan Sulampua adalah sapi, babi dan kambing. Populasi hewan ternak yang terbanyak adalah sapi dengan sentra produksi di Sulawesi Selatan yang mencapai 1.362.600 ekor pada tahun 2019 atau sekitar 46,54% dari total populasi sapi di regional Sulampua, diikuti Sulawesi Tenggara dengan total populasi sapi mencapai 419.900 ekor (14,34%). Selain memiliki populasi sapi terbanyak, Sulawesi Selatan juga memiliki populasi ternak lain (babi dan kambing) serta unggas terbesar di wilayah Sulampua sehingga subsektor peternakan di provinsi ini berkembang lebih maju dibandingkan provinsi-provinsi lain dalam satu kawasan. Sumbangan PDRB subsektor peternakan Sulawesi Selatan mencapai 28,94% terhadap total pembentukan PDRB regional, diikuti oleh Sulawesi Tenggara (15,83%) dan Sulawesi Tengah (15,49%).

Berdasarkan pulau, subsektor peternakan di Pulau Sulawesi lebih maju dibandingkan Pulau Maluku dan Papua karena jumlah populasi ternak dan unggas serta kontribusi subsektor peternakan terhadap total PDRB subsektor peternakan secara regional jauh lebih tinggi. Dilihat dari kontribusinya, subsektor ini masih cukup rendah terhadap PDRB sektor pertanian dengan provinsi Papua memiliki persentase sumbangan tertinggi, yaitu sebesar 17,6% dan terendah di Maluku (2,34%). Sedangkan kontribusi subsektor peternakan terhadap pembentukan PDRB total provinsi tergolong sangat rendah dengan persentase sumbangan tertinggi oleh provinsi Sulawesi Tenggara (2,52%) dan sumbangan terkecil di provinsi Maluku (0,55%). Secara umum, kontribusi subsektor peternakan di provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi lebih besar dibandingkan pulau Maluku dan Papua baik terhadap PDRB sektor pertanian maupun total PDRB provinsi.

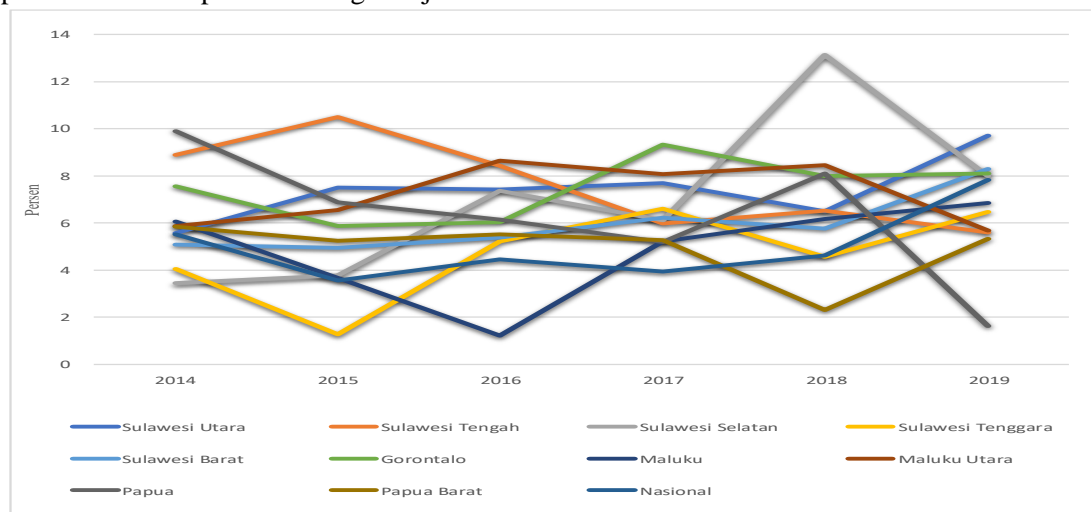
Gambaran umum dapat dilihat pada table 1 yang menyajikan data populasi ternak ternak besar dan kecil, dan kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian dan PDRB total wilayah untuk 10 provinsi di Kawasan Sulampua.

Tabel 1. Jumlah Populasi Ternak dan Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB

Provinsi	Populasi Ternak (Ekor)						Kontribusi terhadap PDRB sektor pertanian (%)	Kontribusi terhadap total PDRB Provinsi (%)	Kontribusi terhadap PDRB Subsektor Peternakan Sulampua (%)
	Sapi	Babi	Kambing	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik dan Itik Manila			
Sulawesi Utara	139.300	427.800	56.300	2.508.000	9.156.100	236.100	11,27	2,35	14,82
Sulawesi Tengah	358.500	265.700	531.500	5.250.400	5.145.400	912.800	7,39	1,92	15,49
Sulawesi Selatan	1.362.600	796.000	860.000	32.941.300	75.283.300	9.569.900	9,23	1,18	28,94
Sulawesi Tenggara	419.900	96.900	188.000	10.189.900	4.127.500	598.300	10,64	2,52	15,83
Sulawesi Barat	96.600	137.100	194.800	4.856.300	2.006.800	396.500	6,36	1,89	4,26
Gorontalo	243.400	10.600	110.200	1.586.600	3.175.800	83.900	8,26	2,38	4,76
Maluku	843.00	88.000	105.900	2871.000	682.300	454.700	2,34	0,55	1,23
Maluku Utara	58.500	71.900	144.400	690.200	259.400	104.700	7,8	1,07	2,06
Papua	112.800	728.200	67.200	2.305.100	6.433.500	160.100	17,6	1,04	9,56
Papua Barat	51.700	89.400	20.200	1.435.700	721.100	101.100	7,09	0,75	3,06

Sumber: Badan Pusat Statistik (Statistik Indonesia 2020)

Secara kewilayahan, subsektor peternakan di Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat memiliki kontribusi paling kecil terhadap total PDRB subsektor peternakan wilayah Sulampua dengan persentase masing-masing sebesar 1,23%, 2,06% dan 3,06%. Pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan merupakan indikator yang menggambarkan perkembangan nilai tambah dari subsektor ini dalam perekonomian wilayah, dimaksudkan untuk melihat tingkat produktivitas output atau tenaga kerja dari tahun ke tahun.



Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan di Kawasan Sulampua Tahun 2014-2019

Berdasarkan grafik 1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan dari masing-masing provinsi di Kawasan Sulampua selama tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi. Hal ini berbeda dengan laju pertumbuhan subsektor peternakan secara nasional dimana laju pertumbuhan subsektor peternakan mengalami penurunan hingga tahun 2016, namun selanjutnya cenderung meningkat hingga tahun 2019. Pola yang hampir mirip dengan nasional dimiliki oleh enam provinsi, yaitu subsektor tumbuh meningkat pada tahun 2019 sedangkan empat provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua justru mengalami penurunan.

Pergerakan laju pertumbuhan subsektor peternakan yang tidak berfluktuasi tinggi terjadi pada Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan secara rata-rata, pertumbuhan subsektor peternakan di provinsi ini masih lebih baik daripada Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Gorontalo dan Sulawesi Selatan karena mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 (9,71%) dengan rata-rata pertumbuhan sepanjang tahun 2014-2019 yang berkisar antara 5,58% - 9,71%. Fluktuasi yang terjadi pada pertumbuhan subsektor mengindikasikan bahwa subsektor ini tetap mengalami peningkatan output dengan prospek menjanjikan, namun perkembangannya mengalami kendala dalam pertumbuhan berkelanjutan.

Analisis Tipologi Klassen

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi subsektor peternakan adalah tingkat kesejahteraan peternak yang diukur melalui NTPT (Nilai Tukar Petani subsektor peternakan). Hal ini disebabkan studi empirik bahwa peningkatan pendapatan dari komoditas subsektor yang diusahakan seharusnya akan meningkatkan taraf kesejahteraan tenaga kerja atau pelaku usaha yang mengusahakan subsektor tersebut secara nominal. Peningkatan pada NTPT mengindikasikan bahwa kesejahteraan peternak relatif lebih baik karena kemampuan nilai tukar petani meningkat (Asmara, Hanani dan Fahriyah, 2016).

Hasil yang diperoleh dari analisis ini terkait dengan pencapaian kesejahteraan peternak adalah sebagai berikut.

1. Kuadran I
Pada kuadran ini menunjukkan tingkat pertumbuhan subsektor yang tinggi sejalan dengan tingkat kesejahteraan petani yang mengusahakan subsektor peternakan yang juga cukup tinggi. Wilayah yang termasuk dalam kuadran ini adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku.
2. Kuadran II
Provinsi Gorontalo yang termasuk dalam kuadran II memiliki laju pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan yang cukup tinggi sejalan dengan tingkat kesejahteraan petani yang mengusahakan subsektor ini yang juga cukup tinggi, namun masih dibawah rata-rata kesejahteraan petani di daerah pada kuadran I.
3. Kuadran III
Kuadran III adalah wilayah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara regional, namun tingkat kesejahteraan petani yang mengusahakan komoditas subsektor peternakan masih termasuk cukup baik. Wilayah-wilayah pada kuadran ini adalah Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua.
4. Kuadran IV
Wilayah yang berada pada kuadran ini adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Papua Barat karena memiliki laju pertumbuhan subsektor dan tingkat kesejahteraan petani yang mengusahakan subsektor peternakan dibawah rata-rata regional Sulampua. Namun hanya Provinsi Papua Barat yang memiliki tingkat kesejahteraan

petani subsektor peternakan dibawah 100, yang artinya petani di wilayah ini mengalami defisit karena tingkat pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran untuk barang konsumsi dan proses produksi usaha peternakan.

Berdasarkan kuadran, empat provinsi pada kuadran I dan satu provinsi pada kuadran II menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan pada subsektor peternakan meningkatkan kesejahteraan relatif petani/peternak yang mengusahakan subsektor tersebut. Sedangkan pada kuadran III dan kuadran IV, meski pendapatan subsektor ini mengalami kenaikan, tingkat kesejahteraan belum sebaik yang diharapkan.

Selain itu, dengan membandingkan antara laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB per wilayah terhadap rata-rata regional maka diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Daerah yang cepat maju dan cepat berkembang (Kuadran I)
Provinsi yang memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi subsektor peternakan yang lebih tinggi daripada rata-rata regional adalah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Barat.
2. Daerah berkembang cepat (Kuadran II)
Yang termasuk dalam kuadran ini adalah provinsi Sulawesi Selatan dan Maluku karena memiliki laju pertumbuhan subsektor peternakan yang lebih tinggi daripada rata-rata regional, namun memiliki kontribusi lebih kecil daripada kontribusi rata-rata regional.
3. Daerah maju tetapi tertekan (Kuadran III)
Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara termasuk dalam kuadran ini karena daerah-daerah ini memiliki kontribusi subsektor peternakan yang lebih tinggi daripada rata-rata kontribusi subsektor ini secara regional, namun memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah daripada rata-rata regional.
4. Daerah relatif tertinggal (Kuadran IV)
Yang mencakup kuadran ini adalah Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat karena memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi subsektor peternakan yang lebih rendah daripada rata-rata regional.

Dari hasil kuadran diatas, hasil yang konsisten adalah subsektor peternakan di Provinsi Papua Barat yang berada pada kuadran IV seperti sebelumnya. Hal ini berarti bahwa provinsi ini belum mengembangkan subsektor peternakan sebaik provinsi-provinsi lainnya di kawasan Sulampua karena kinerja subsektornya masih dibawah rata-rata regional. Selain provinsi tersebut, Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat juga konsisten berada pada kuadran I yang mengindikasikan pengelolaan subsektor peternakan di kedua provinsi ini telah berperan dalam peningkatan kesejahteraan penduduk yang mengusahakan subsektor tersebut dan perekonomian wilayah.

Analisis Location Quotient (LQ)

Perekonomian wilayah memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk agar tetap bertahan hidup. Namun tak semua kegiatan ekonomi dapat menghasilkan barang dan jasa yang mampu memenuhi permintaan penduduk. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi potensi sektor/subsektor yang termasuk dalam sektor/subsektor basis dan non-basis. Sektor/subsektor basis adalah kegiatan ekonomi yang memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun pasar di luar wilayah. Sedangkan sektor non-basis merupakan kegiatan ekonomi yang memproduksi komoditas yang hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis LQ pada tabel 2 menunjukkan bahwa subsektor peternakan di lima provinsi merupakan subsektor basis sementara subsektor peternakan di lima provinsi

lainnya tergolong dalam subsektor non basis. Menariknya, meski Sulawesi Selatan adalah daerah sentra produksi hasil-hasil subsektor peternakan, namun nilai $LQ < 1$ yang berarti bahwa produksi subsektor ini masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 yang mencapai 8.851,2 ribu jiwa atau 2,6 kali lipat dari penduduk di Provinsi Papua (wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di regional Sulampua), diperkirakan kebutuhan untuk konsumsi produk-produk peternakan di Sulawesi tertinggi di kawasan Sulampua.

Jika dilihat berdasarkan pulau, provinsi-provinsi di Pulau Maluku dan Papua memiliki $LQ < 1$ yang artinya subsektor peternakan di kedua pulau tersebut merupakan subsektor non-basis. Hal ini sejalan dengan kontribusi subsektor peternakan terhadap pembentukan PDRB provinsi yang masih sangat rendah (hanya rata-rata satu persen). Sementara itu, Sulawesi Selatan menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang memiliki subsektor peternakan berkategori non-basis, mengindikasikan bahwa pertumbuhan subsektor ini belum seoptimal yang diharapkan.

Tabel 2. Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Subsektor Peternakan di Sulampua Tahun 2014-2019

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata	Basis/Non Basis
Sulawesi Utara	1,27	1,31	1,33	1,36	1,37	1,39	1,34	Basis
Sulawesi Tengah	1,29	1,25	1,24	1,24	1,25	1,20	1,24	Basis
Sulawesi Selatan	0,71	0,70	0,70	0,70	0,74	0,73	0,71	Non Basis
Sulawesi Tenggara	1,73	1,66	1,65	1,66	1,64	1,60	1,66	Basis
Sulawesi Barat	1,23	1,22	1,22	1,23	1,23	1,23	1,23	Basis
Gorontalo	1,67	1,69	1,69	1,75	1,78	1,77	1,73	Basis
Maluku	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	Non Basis
Maluku Utara	0,63	0,65	0,67	0,68	0,68	0,66	0,66	Non Basis
Papua	0,57	0,56	0,54	0,55	0,56	0,66	0,57	Non Basis
Papua Barat	0,49	0,51	0,51	0,53	0,51	0,51	0,51	Non Basis

Sumber: Badan Pusat Statistik-Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, 2019 (diolah)

Analisis Shift Share (*SSA-Shift Share Analysis*)

Kinerja atau produktivitas suatu sektor/subsektor yang menyangga perekonomian suatu wilayah juga diperbandingkan antar daerah untuk memperoleh gambaran keunggulan komparatif wilayah tersebut dalam cakupan yang lebih luas. Selain itu, komparasi juga diperlukan antar sektor/subsektor untuk melihat perkembangan sektor/subsektor jika dibandingkan secara relatif dengan sektor/subsektor lain sebagai rujukan pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan proporsional bernilai negatif untuk semua wilayah di kawasan Sulampua. Hal ini mengindikasikan subsektor peternakan memiliki pertumbuhan yang lambat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan subsektor ini di masing-masing provinsi berfluktuasi selama tahun 2014-2019 meskipun masih tumbuh positif. Jika dilihat dari pergeseran diferensial yang menunjukkan nilai positif pada tujuh provinsi mengindikasikan bahwa meski pertumbuhan subsektor peternakan menunjukkan

perlambatan, namun masih memiliki daya saing yang baik secara nasional. Sedangkan subsektor peternakan di Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua Barat menunjukkan hasil negatif yang berarti subsektor ini relatif tidak memiliki daya saing dibandingkan daerah-daerah lain secara nasional.

Hal yang menarik adalah subsektor peternakan di Sulawesi Tenggara mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian wilayah ini (kontribusi tertinggi terhadap total PDRB provinsi dibandingkan wilayah lain di Sulampua) serta mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan luar wilayah (nilai LQ > 1), akan tetapi subsektor ini relatif tidak memiliki daya saing secara nasional. Secara regional, subsektor peternakan di Sulawesi Tenggara bahkan kontribusinya tertinggi kedua setelah Sulawesi Selatan. Sebaliknya, meskipun subsektor peternakan di Sulawesi Selatan hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, subsektor ini memiliki daya saing yang kuat secara nasional.

Tabel 3. Hasil Analisis Shift Share (SSA) Subsektor Peternakan di Sulampua Tahun 2014-2019

	Pertumbuhan Wilayah	Pertumbuhan Proporsional	Pergeseran Differensial	Total SSA
Sulawesi Utara	363,20	-12,72	240,48	590,97
Sulawesi Tengah	396,82	-13,89	227,49	610,42
Sulawesi Selatan	714,74	-25,02	451,16	1.140,87
Sulawesi Tenggara	507,18	-17,76	-7,00	482,43
Sulawesi Barat	128,32	-4,49	35,33	159,15
Gorontalo	149,39	-5,23	88,06	232,22
Maluku	36,88	-1,29	-2,13	33,46
Maluku Utara	52,42	-1,84	31,14	81,73
Papua	287,52	-10,07	43,43	320,88
Papua Barat	106,80	-3,74	-3,43	99,63

Sumber: Badan Pusat Statistik-Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, 2019 (diolah)

KESIMPULAN

Kesimpulan

Subsektor peternakan di kawasan Sulampua memiliki prospek relatif menjanjikan untuk dikembangkan di Pulau Sulawesi dikarenakan provinsi-provinsi di pulau ini memiliki populasi hewan ternak dan unggas lebih banyak, kontribusi subsektor peternakan terhadap pembentukan PDRB sektor pertanian dan PDRB total provinsi yang lebih besar, dan subsektor peternakan secara umum tergolong subsektor basis kecuali Sulawesi Selatan serta memiliki daya saing yang relatif baik secara nasional, kecuali subsektor di Sulawesi Tenggara. Sedangkan subsektor peternakan di provinsi-provinsi di Pulau Maluku dan Papua termasuk relatif tertinggal dengan tingkat pertumbuhan dan kontribusi subsektor lebih rendah daripada rata-rata regional Sulampua, kecuali Maluku. Selain itu, subsektor peternakan pada kedua pulau tersebut termasuk

sektor non basis dengan kemampuan memproduksi komoditas yang berdaya saing secara nasional hanya dimiliki Maluku Utara dan Papua. Hasil kajian tersebut hanya sebagai informasi awal mengenai kondisi subsektor peternakan di regional Sulampua dan dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai komoditas peternakan lebih spesifik serta dengan objek penelitian difokuskan pada wilayah dengan potensi yang menjanjikan secara ekonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merumuskan formulasi kebijakan yang tepat untuk pengembangan subsektor peternakan agar mampu menjadi sentra produksi hasil-hasil peternakan di luar Pulau Jawa dan Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Gorontalo. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo
- BPS Maluku. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Ambon
- BPS Maluku Utara. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku Utara Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, Ternate
- BPS Papua. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura
- BPS Papua Barat. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Manokwari
- BPS Sulawesi Barat. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Barat Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju
- BPS Sulawesi Selatan. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar
- BPS Sulawesi Tengah. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Palu
- BPS Sulawesi Tenggara. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari
- BPS Sulawesi Utara. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Manado
- BPS Gorontalo. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo
- BPS Maluku. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Ambon
- BPS Maluku Utara. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Maluku Utara Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, Ternate
- BPS Papua. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Jayapura
- BPS Papua Barat. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Manokwari

-
- BPS Sulawesi Barat. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Barat Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju
- BPS Sulawesi Selatan. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar
- BPS Sulawesi Tengah. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Palu
- BPS Sulawesi Tenggara. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari
- BPS Sulawesi Utara. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Manado
- Hudang, A., K. 2016. *Perencanaan Pengembangan Subsektor Peternakan Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian di Kabupaten Sumba*. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*, 16(2), 331-344
- Ismail, F. 2008. *Peranan dan Dampak Investasi Sektor Peternakan dalam Perekonomian Indonesia*. Institut Pertanian Bogor
- Kesuma, N.L.A., & Utama, I.M.S. 2015. *Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Pangsa Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 100-107
- Mulyono, H. 2007. *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Peternakan Sapi Potong (Studi Pola Kemitraan Pada Peternakan Makmur di Sukoharjo)*. Diakses dari www.eprints.ums.ac.id pada tanggal 18 Juli 2020
- Asmara R. & Hanani N. & Fahriyah F., 2016. Farmers' welfare level based on Farmer's terms of Trade (FTT) index. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, CyberLeninka; Редакция журнала Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 60(12), 33-38.
- Yulia, Baga, L.M., Tinaprilla, N. 2015. *Peran dan Strategi Pengembangan Subsektor Peternakan dalam Pembangunan Kabupaten Agam Sumatera Barat*. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 3(2), 159-176